

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan hingga saat ini menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan di Indonesia. *World bank* menekankan bahwa pemahaman tentang kemiskinan harus mencakup dimensi multidimensional, memperhitungkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada ketidaksetaraan dan terpinggirkan. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi suatu Negara, ketidaksetaraan yang ekstrem dapat menciptakan jurang yang memisahkan kelompok masyarakat tertentu dari akses terhadap sumber daya dan peluang (Sianturi et al., 2021). Presentase penduduk miskin di Indonesia sendiri mencapai 9,36 persen pada pada Maret 2023 sebesar 25,90 Juta (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut *World Bank* dalam (Salsabil & Riani, 2023), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan *asset (lack of income and asset)* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima. Disamping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender merupakan isu krusial yang ada dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketidaksetaraan gender menjadi salah satu akar penyebab kemiskinan sehingga keduanya saling terkait. Hal ini disebabkan karena perempuan dan anak-anak mengalami kemiskinan jauh lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Banyak literatur yang menyatakan bahwa dimana kemiskinan, di tempat tersebut mereka yang miskin lebih banyak dan lebih parah berasal dari kaum perempuan. Bahkan hal ini disebut oleh Fukuda-Parr dalam (Auzar, 2021) yaitu sebagai sebuah *truism*, pernyataan yang sudah jelas dan bukan hal baru.

Kajian mengenai feminisasi kemiskinan dalam konteks global juga banyak dilakukan. Kajian (Ede'o et al., 2020) mengonfirmasi konsep ini pada kasus kemiskinan di sub-Sahara Afrika. Kajian ini menyimpulkan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan di Euthopia, Malawi, Rwanda dan Tanzania berkondisi lebih miskin dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Schaefer, 2012) bahwa di Amerika serikat, sekitar setengah dari semua perempuan berada dalam garis kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena kecacatan atau kematian suami yang mengakibatkan seorang wanita menjadi kepala rumah tangga tunggal.

Feminisasi kemiskinan juga terjadi di Indonesia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Laksono, 2017), mengungkapkan bahwa Feminisasi kemiskinan yang terjadi di Desa Kembang Belor Pacet Mojokerto merupakan fenomena dimana seorang perempuan menjadi kepala keluarga di dalam keluarga miskin. Kondisi kemiskinan yang dialami suatu keluarga karen suami tidak bekerja atau

mengalami kecacatan, penghasilan suami yang minim sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan ditinggal meninggal oleh suami. Tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender masih dihadapi oleh Indonesia dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan antara lain pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Perempuan yang banyak mengalami kemiskinan ialah perempuan yang menjadi kepala keluarga. Menurut Zulminarni dalam (Wibawa & Wihartanti, 2018) bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga dikarenakan ada beberapa faktor antara lain : (1) perempuan yang ditinggal/dicerai hidup oleh suaminya, (2) perempuan yang suaminya meninggal dunia, (3) perempuan bersuami, tetapi oleh karena hal suaminya tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga, (4) perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan (5) perempuan yang bersuami namun suami tidak hidup dengannya secara berkesinambungan karena merantau atau berpoligami.

Berdasarkan hasil literature review yang dilakukan oleh peneliti, bahwa latar belakang perempuan menjadi kepala keluarga yaitu perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya, bercerai atau ditinggal suami tanpa kejelasan. Berdasarkan data (Widi, 2023) menunjukkan bahwa 12,72% kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2022. Adapun 48,72% kepala rumah tangga perempuan memiliki 2-3 anggota keluarga, sebanyak 20,37% kepala rumah tangga perempuan yang jumlah anggotanya sebanyak 4-5 orang dan sebanyak 5,42% kepala rumah tangga perempuan dengan 6 anggota keluarga.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti bahwa ada sebanyak 16,4% perempuan berstatus sebagai kepala rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian, 62,76% disebabkan kematian pasangannya.

Penanganan kemiskinan Di Indonesia sendiri telah dilakukan oleh berbagai sektor dan program, baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, lembaga sosial masyarakat maupun perusahaan swasta. Bahkan PBB dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) memposisikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan pertama (*No Poverty*). Agenda SDGs merupakan kelanjutan dari agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang menempatkan isu kemiskinan sebagai persoalan yang perlu ditanggulangi secara global.

Pendekatan penanganan kemiskinan dapat dilakukan melalui dua strategi utama yakni pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivita kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya misalnya melalui program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENANA), Program PKH, BPNT, Bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Kartu Jakarta Pintar (KJP), maupun pemberdayaan melalui kelembagaan lokal lainnya.

Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. (Susilo & Ramadhani, 2022) menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan

kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Kelurahan Klender merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Jl. Bulak Timur I Nomor. 12 Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur. Masyarakat Kelurahan Klender rata-rata memiliki pendidikan yang sangat rendah termasuk para ibu rumah tangga dengan pendapatan yang tidak menentu membuat mereka cukup kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga. Kemudian, untuk mendukung adanya peningkatan ekonomi masyarakat terutama bagi perempuan kepala keluarga pemerintah Kelurahan Klender yaitu melakukan pemberdayaan melalui program bank sampah. Program bank sampah ini didirikan sebagai bentuk tanggung jawab dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan permasalahan sampah. Program bank sampah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ibu-ibu yang tidak mempunyai simpanan tabungan. Namun pada kenyataan masih ditemukan permasalahan, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga. Selain itu, kegiatan yang mendorong sektor perekonomian harus dilakukan oleh semua pihak dengan melibatkan masyarakat secara maksimal dan bertujuan agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan (Sutrisna, 2019).

Berdasarkan hasil temuan peneliti pada saat melakukan praktikum profil manajemen perubahan komunitas menyimpulkan bahwa permasalahan yang

dialami oleh perempuan kepala keluarga di Kelurahan Klender yaitu (1) strategi pemecahan masalah keuangan dengan meminjam uang ke lembaga peminjaman dana ilegal (2) kurangnya pengetahuan terkait pengelolaan keuangan, (3) kurangnya pengendalian dalam menentukan prioritas kebutuhan (4) tidak memiliki investasi jangka panjang, (5) kesulitan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, (7) tidak adanya kegiatan yang mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat (6) belum memanfaatkan dan menjalin kerja sama dengan sistem sumber.

Hal ini diperkuat dengan hasil survey yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman wanita terkait literasi keuangan masih tergolong rendah sebesar 36,13% dan laki-laki sebesar 39,94% (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021). Sedangkan berdasarkan strata wilayah, untuk wilayah perkotaan tingkat literasi keuangan mencapai 41,41% sementara masyarakat perdesaan adalah 34,53%. Rendahnya tingkat literasi keuangan wanita dibandingkan laki-laki serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan menjadi tugas pemerintah untuk menyebarluaskan agar dapat tercapainya stabilitas ekonomi keluarga sehingga dapat mencapai keberhasilan perekonomian Negara.

Literasi keuangan paling sering dilihat sebagai jenis khusus keahlian individu yang berkaitan dengan pengelolaan urusan keuangan pribadi. Secara konseptual, literasi keuangan mengacu pada keterampilan dan ukuran yang ada didominasi oleh ukuran pengetahuan yang objektif. Banyak hasil studi menemukan individu pada umumnya memiliki keterbatasan dan kurang informasi keuangan dan prinsip-prinsip keuangan dasar (Lusardi & Mitchell, 2014 dalam

(Goso, 2022)). Pengelolaan keuangan rumah tangga bertujuan untuk mendayagunakan kesadaran, sikap, perilaku dan kemauan anggota serta menggerakkan potensi ekonomi keluarga. Hal ini guna memenuhi secara optimal kebutuhan ekonomi anggota keluarga, terciptanya stabilitas kehidupan ekonomi keluarga, serta penguatan ketahanan keuangan keluarga (Rodhiyah et al., 2022).

Selain penguatan literasi keuangan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Klender yaitu penguatan jaringan sosial. Jaringan sosial digunakan sebagai salah satu strategi berkehidupan sosial dimasyarakat, lembaga, kelompok dan sebagainya. Menurut (Agusyanto, 2007) jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus dimana “ikatan” yang menghubungkan satu titik ke titik lain didalamnya ialah hubungan sosial. Dalam hal ini, hubungan sosial diikat oleh adanya unsur kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan oleh adanya norma-norma yang ada. Pada konsep jaringan sosial terdapat unsur kerja yang melalui hubungan sosial yakni kerja sama. Menurut (RMZ, 2004) unsur-unsur jaringan/kelompok dalam teorinya mengatakan bahwa haringan harus mencakup adanya ikatan atau hubungan yang saling peduli/percaya antar sesama kelompok.

Jaringan sosial dalam pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai keterkaitan antar individu dan kelompok yang mana keterkaitan tersebut memberikan manfaat dalam mengelola sumber daya bersama karena akan mempermudah adanya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan yang timbal balik. Dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan yang optimal, maka diperlukan juga penguatan jaringan sosial dengan berbagai pihak. Melalui

penguatan jaringan sosial dapat membantu perempuan kepala keluarga mengatasi permasalahannya dan dapat menjadikan perempuan kepala keluarga lebih mandiri secara ekonomi dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengimplementasikan, menyempurnakan dan memperbaiki desai pada saat praktikum profil manajemen perubahan komunitas melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan metode kualitatif penelitian yang dilakukan berjudul “Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model untuk menjawab isu atau masalah dan kebutuhan perempuan kepala keluarga dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur?” Selanjutnya secara lebih rinci rumusan masalah diuraikan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana desain awal pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan jaringan sosial di Kelurahan Klender?



2. Bagaimana identifikasi kebutuhan pengembangan model pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan jaringan sosial di Kelurahan Klender?
3. Bagaimana perencanaan pengembangan model pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan jaringan sosial di Kelurahan Klender?
4. Bagaimana implementasi pengembangan model pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan jaringan sosial di Kelurahan Klender?
5. Bagaimana evaluasi desain akhir pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan jaringan sosial di Kelurahan Klender?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender. Selanjutnya secara lebih rinci tujuan penelitian ini diuraikan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Merumuskan Desain Awal Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender.
2. Mengidentifikasi Kebutuhan Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender.

3. Merumuskan Perencanaan Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender.
4. Mengimplementasi Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender.
5. Mengevaluasi Desain Akhir Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Melalui Literasi Keuangan dan Jaringan Sosial di Kelurahan Klender

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan yang akan mengarah pada perbaikan dan pemberdayaan masyarakat yang kolaboratif antara pekerjaan sosial dan perempuan kepala keluarga dalam bidang praktik pekerjaan sosial dengan masalah kemiskinan perempuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan yang dapat menunjang proses pemberdayaan masyarakat khususnya bagi perempuan kepala keluarga sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya sebagai berikut:

- BAB I**        **PENDAHULUAN** memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II**        **KAJIAN PUSTAKA** memuat tentang penelitian terdahulu dan kepustakaan yang relevan dengan penelitian
- BAB III**       **METODE PENELITIAN** memuat tentang rancangan penelitian, penjelasan istilah, sumber data dan cara menentukannya, penentuan keabsahan data, teknik pengumpulan data, analisis data serta langkah dan jadwal penelitian.
- BAB IV**        **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V**        **IMPLIKASI HASIL PENELITIAN** memuat tentang hasil temuan dan implikasi teori dan praktik penelitian
- BAB VI**        **KESIMPULAN DAN SARAN** memuat tentang ringkasan hasil penelitian dan jawaban atas tujuan penelitian atau hipotesis, serta saran yang diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian.